

ABSTRAK

Hadirnya media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat komunikasi antar masyarakat melainkan juga oleh pemerintah. Kemudahan yang ditawarkan media sosial mampu mengubah model komunikasi pemerintah menjadi dua arah. Namun hadirnya media sosial dalam demokrasi menjadikan makna berkebebasan yang berkembang didalam masyarakat tentu menjadi bias. Bias makna ini semakin runyam tatkala masyarakat yang berperan penting dalam demokrasi masih dipertanyakan kompetensi dan akuntabilitasnya dalam berdemokrasi era digital. Oleh karena itu, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui DISKOMINFO sebagai yang punya wewenang melakukan *filtering* informasi dengan harapan demokrasi digital tetap berjalan dijalurnya. Oleh karena itu rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apa yang perlu dilakukan agar praktek bersosial media tidak berjalan terbalik.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka pikir demokrasi sebagai penjaminan kebebasan untuk kepublikan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber yaitu DISKOMINFO selaku wakil dari negara dan masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap tema penelitian terkait. Selanjutnya teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang digagas oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada yang salah dalam praktek demokrasi era digital yang ditandai dengan kurangnya akuntabilitas dan inkompetensi dari masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam memanfaatkan media sosial untuk berdemokrasi yang mana pada akhirnya menjadikan DISKOMINFO harus bekerja dua kali melalui *filtering* informasi. Berangkat dari kesimpulan tersebut maka diperlukannya model asistensi yang dilakukan oleh negara yang mana hal ini juga berkaitan dengan keperluan mainstreaming kewarganegaraan dalam berdemokrasi diantaranya kebebasan yang bertanggungjawab oleh masyarakat.

Kata kunci: Media Sosial, *Filtering* Informasi, Demokrasi Digital, Akuntabilitas, Cita Kepublikan.

ABSTRACT

The usefulness of social media as a communication not only for society but it can be used for Government also. The convenience offered by social media can change the government communication model into two directions. But the presence of social media in democracy makes the meaning of freedom which develops in society become biased. The meaning of bias becomes worse because the society who play an important role in democracy still asking about the competence and accountability in the democratic digital era. Therefore, the state in this case Government of Karanganyar Regency through DISKOMINFO as the authority to filter the information hopefully the digital democracy still going on that way. So the formulation of the problem will be answered in this research is what are we need to do so that the practice of social media isn't upside down?.

To answer that formulation of the problem, this research uses democracy framework used as a guarantee freedom for publicity. Furthermore this research also uses quantitative with primary and secondary data. Primary data is getting by observation and deep interview to the interviewer, that is DISKOMINFO as a vice from state and society of Karanganyar Regency with determined criteria. For the secondary data, it's getting by literature study which is related with theme of research. Next, for the analysis technique in this research we use qualitative analysis technique which conceived by Miles and Huberman, that is data reduction, data presentation, and make conclusion.

Based on the analysis result, we can get conclusion if still there's something wrong in the practice of democratic digital era that signed with lack of accountability and incompetence from society of Karanganyar Regency in utilizing social media for democracy. Finally it made DISKOMINFO must be work for twice through filtering information. Start from the conclusion, we need to do an assistance model by the state which it related with necessity of citizenship mainstreaming in democracy among the freedom of responsibility by the society.

Keywords: Social Media, Filtering the Information, Digital Democracy, Accountability, Publicity Ideals